

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis melakukan pembahasan secara teliti tentang kinerja Dinas Pariwisata dalam mendukung peningkatan PAD, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Kinerja Organisasi Dinas Pariwisata yang meliputi beberapa aspek, antara lain :
  - a. Aspek Produktivitas terdiri dari upaya Dinas dalam meningkatkan produktivitas dikategorikan cukup baik dan dalam meningkatkan fasilitas dikategorikan cukup baik.
  - b. Aspek Kualitas Pelayanan terdiri dari keterampilan yang dimiliki petugas dikategorikan kurang baik dan kredibilitasnya dikategorikan cukup baik.
  - c. Aspek Akuntabilitas terdiri dari keterbukaan Dinas yang dikategorikan cukup baik dan bentuk pertanggung jawaban dikategorikan kurang baik.
  - d. Aspek Responsivitas terdiri dari daya tanggap para petugas Dinas dalam menanggapi kebutuhan dan keinginan pengunjung dikategorikan cukup baik dan pemberian izin dalam mendirikan usaha pondok wisata dikategorikan cukup sulit.
  - e. Aspek Responibilitas terdiri dari dedikasi dan semangat kerja petugas organisasi dikategorikan tidak memiliki/kurang baik dan pembinaan

dan pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan pariwisata dikategorikan cukup baik.

f. Aspek Profesionalitas terdiri dari pengetahuan dan keahlian petugas dapat dikategorikan kurang baik dan kemampuan dalam bekerja sama dapat dikategorikan cukup baik.

2. Pemberdayaan karyawan terdiri dari peningkatan disiplin pegawai dapat dikategorikan cukup baik dan profesionalitas kerja kurang baik.

3. Efektifitas dan Efisiensi terdiri dari analisis efektifitas dan efisiensi Dinas Pariwisata dikategorikan cukup baik dan efisiensi organisasi dilihat dari sumber dayanya dikategorikan kurang baik.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian selama penulis mengadakan penelitian lapangan dengan judul “ Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Kinerja Sektor Pariwisata ( Studi Kasus di Dinas Pariwisata Kabupaten Majalengka ),

Maka penulis menyarankan kepada Dinas Pariwisata agar :

1. Meningkatkan pelatihan-pelatihan petugas Dinas Pariwisata dalam bentuk keterampilan, keahlian dan pengetahuan.
2. Mengurangi persyaratan-persyaratan dalam memberikan izin untuk mendirikan usaha pondok wisata.
3. Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan wisata.